

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini umat Islam tengah melintasi suatu fase yang sangat menentukan. Kebangkitan Islam secara luas mendapat tempat di hampir setiap negeri Muslim, bahkan di sebagian negeri non Muslim. Struktur-struktur politik dari berbagai negara Muslim sedang mengalami diversifikasi besar-besaran semenjak tercapainya kemerdekaan. Gerakan Islamisasi yang ditujukan untuk tercapainya *renaissans* (kebangkitan) intelektual dan kultural, muncul di seluruh dunia Islam dengan semangat yang sangat besar untuk merehabilitasi nama Islam, membangkitkan kembali kejayaan peradaban masa lalu dan membangun kembali ideologi Islam (Al Ghazali, 2001).

Islam adalah kekuatan sosio kultural satu-satunya yang paling konsisten dan kenyal (*pervasif*) di daerah-daerah yang didiami oleh penduduk Muslim yang sangat banyak (Al Qardhawi, 2001). Tidak seperti masyarakat modern di Barat, dimana agama hanya dipakai untuk *Sunday Service* dan hanya berlaku pada kesempatan-kesempatan khusus seperti upacara perkawinan dan kematian, Islam mencakupi keseluruhannya; segala hubungan-hubungan sosial dirumuskan, ditentukan, dan diatur oleh agama. Diferensiasi fungsional sebagaimana yang didapatkan dalam karakteristik dunia Barat seperti pemisahan antara politik, ekonomi, sosial dan agama tidak diketemukan dalam Islam. Malahan sebaliknya, terdapat kesatuan antara agama dan masyarakat. Didalam Islam tidak terdapat pemisahan antar yang bersifat *temporal* dan

religius, antara yang sekuler dan yang sentral. *Spirit* Islam menyerap keseluruhan bidang dan segi kehidupan, baik itu *privat*, politik, sosial, ekonomi, maupun keagamaan.

Opini global yang mendunia tentang betapa hebat dan kuatnya Islam sebagai "*the way of life*" sehingga Huntington (2000) dalam bukunya yang populer dan laris manis diterjemahkan dalam berbagai bahasa secara tidak langsung telah menjadi "provokator" masyarakat dunia terhadap "Perang Hijau" setelah berlalunya "Perang Merah" dengan kemenangan Barat (pimpinan Amerika Serikat) atas paham Komunisme pimpinan Uni Sovyet dimasa itu. Buku Perang Antar Peradaban mencerminkan tentang kekaguman –sekaligus kengerian- Barat terhadap Islam sebagai sumber peradaban dan sistim yang melingkupi sebagian masyarakat dunia yang nota bene bersebrangan pendapat dengan mereka. Selanjutnya lebih mempertajam perseteruan ini lagi dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Islam adalah ancaman yang perlu diwaspadai masyarakat dunia secara global.

Masalah mendasar yang tengah dihadapi adalah bagaimana menegakkan kembali ideologi dan merumuskan sistem Islam di dunia modern (Ruslan, 2000). Meskipun masyarakat-masyarakat Muslim selama ini tengah mengalami *rigiditas* dalam penerapan ajaran Islam. Islam diambil dalam penerapan ritualitas, tetapi tidak dalam dalam bidang-bidang kehidupan lainnya.

Pada tahun 1998 dideklarasikan berdirinya sebuah partai politik dengan nama Partai Keadilan (Anonim, 2000) dan sempat mengikuti proses Pemilihan Umum 1999 di Indonesia. Kemudian sejarah mencatat bahwa perjalanan Partai

Keadilan tidaklah panjang, karena pada tahun 2003 para aktivisnya mendeklarasikan wadah perjuangan yang bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Yusuf Qardhawi (2001) mengatakan bahwa Indonesia sebuah negeri dengan penduduk muslim yang sangat besar jumlahnya, mempunyai aset untuk menjadi sebuah peradaban besar dikemudian hari. Selanjutnya Anis Matta (2007) dalam menanamkan konsep perjuangan dikatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah sari pati bangsa dan yang paling bertanggung jawab untuk mengubah Indonesia menjadi *icon* peradaban dunia.

Namun demikian, dalam platform kebijakan pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, memberikan pandangan bahwa kondisi nasional dan akar permasalahan bangsa paling tidak meliputi masalah kesenjangan, masalah identitas sosial budaya, modal spiritual dan masalah kebijakan. Sehingga menarik untuk diteliti, bagaimana konsep Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang pendidikan, yang diharapkan sebagai cerminan dari kebangkitan Islam. Karena kebangkitan dan kejayaan Islam tidak akan muncul jika tanpa mendidik masyarakatnya.

Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (2007) juga merumuskan sejumlah masalah yang mengepung setiap perorangan maupun kelompok, perkara yang bersifat individual maupun kolektif, yang harus ditanggung dan dihilangkan. Permasalahan berkembang secara kumulatif, makin lama makin menumpuk dan memuncak, sehingga seorang atau suatu bangsa tak bisa lagi mencari jalan keluar.

Permasalahan pertama bersifat psikologis yakni merajanya rasa cemas (*anxiety*) dan putus asa (*despair*). Kecemasan bermula dari ketidakpuasan terhadap situasi yang sedang berlangsung, dan kekhawatiran menyongsong masa depan yang serba tidak pasti. Krisis dan tekanan yang silih berganti memburamkan pandangan dan mengubur harapan yang tersisa. Yang tinggal hanya perasaan bersalah (*guilty feeling*), atau kebiasaan menyalahkan orang lain (*"the enemy is out there"*), tanpa kesanggupan melakukan koreksi atau otokritik secara ksatria.

Permasalahan peringkat kedua bersifat *psikososiologis*, yaitu sifat hina dan malas. Perasaan rendah diri menjangkiti jika berhadapan dengan orang lain bahkan, kebiasaan mengisolasi diri dari pergaulan dengan sesama umat manusia tumbuh akibat takut bersaing. Ada bangsa yang merasa bodoh, miskin, dan terbelakang hanya karena faktor-faktor fisika-materialistik belaka. Selanjutnya tidak ada keinginan untuk menjadi lebih baik, mencapai taraf yang sama didepan bangsa lain. Malas untuk menuntut pengetahuan dan pengalaman baru, menghadapi tantangan dan ujian yang sudah sewajarnya dilakono demi mencapai prestasi yang lebih baik atau yang terbaik. Akhirnya bangsa ini menghibur diri dengan keadaan *stagnan*.

Penyakit ketiga bersifat *sosioantropologis*, berupa jiwa pengecut. Berupa jiwa pengecut dan kikir. Pada stadium ini, tak ada lagi semangat juang (*fighting spirit*) dan jiwa kepahlawanan (*heroism*), semua hanya cerita masa lalu yang dibangga-banggakan sebagai warisan nenek moyang. Setiap orang merasa enggan untuk berkorban demi untuk menyelamatkan masyarakat secara

keseluruhan, sebab pengorbanan yang tulus (*altruism*) dipandang sebagai kesediaan dan tak akan menghasilkan kompensasi konkrit. Dengan demikian, musuh utama bukan berada di luar diri melainkan didalam diri sendiri, termasuk kekikiran dan ketamakan diri yang menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan sosial. Tak ada lagi keinginan untuk berbagi dengan orang lain, karena nafsu kepemilikan dan haus kekuasaan tak bisa dikendalikan. Masing-masing orang mencari selamat sendiri, meskipun tahu perahu bangsa akan segera tenggelam.

Puncak dari permasalahan itu bersifat *ekonomi-politis* yaitu jeratan hutang dan dominasi kekuatan asing. Individu atau bangsa yang selalu cemas serta malas berfikir dan bekerja biasanya suka mencari jalan pintas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus mendesak, sementara penghasilan terbatas, maka para pemalas cenderung memperbesar utang. Padahal, kekayaan terpendam yang dimiliki dan sumber daya yang menganggur masih berlimpah namun tidak terkelola dengan baik. Jerat utang (*debet trap*) mulanya membuat orang hidup nyaman karena tak perlu bekerja keras cukup mengandalkan "kebaikan hati" orang lain. Namun lama-kelamaan, hitung itu menimbulkan ketergantungan, bahkan ketundukan pada kekuatan asing. Penyaluran hutang adalah modus *imperialisme* yang paling canggih, sebab bangsa yang ditaklukan tidak merasa dirinya dijajah oleh para kapitalis global.

Esensi rangkaian permasalahan empiris atau penyakit individu dan sosial yang sedang kita hadapi. Sejak kritis ekonomi dan moneter satu dasa warsa silam bangsa Indonesia belu lepas dari jerat masalah yang kini jadi benang kusut krisis multidimensional. Krisis ekonomi, politik, moral dan budaya

menjadi lebih mendalam. Perubahan yang sangat cepat, tatanan demokrasi yang belum mantap, arus globalisasi yang diawali dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, program pemulihan krisis yang belum tuntas, diikuti pergantian pemimpin yang relatif cepat. Sementara tuntutan demokrasi, otonomi daerah dan kebebasan pers membuat pengelolaan negara tidak semudah dalam iklim *otoritarian semi militeristik*. Sementara tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat masih tergolong sangat rendah terjadi *decouplin* ekonomi-politik dimana keterbukaan, kebebasan, partisipasi masyarakat meningkat, namun tidak diiringi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat (Abu Ridha, 2002). Kemiskinan dan pengangguran justru meningkat ditengah arus demokratisasi. Bahkan, demokratisasi dan otonomi daerah telah menyebarkan virus KKN, bukan hanya secara teritorial tetapi secara vaksional di lembaga-lembaga seperti legislatif, partai politik, lembaga sosial dan lain-lain.

Meski telah memasuki usia enam dasawarsa lebih sejak kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia ternyata masih kesulitan untuk menentukan jati diri yang sesungguhnya. Inilah permasalahan yang utama yang sejak dahulu disebut nusantara-negeri yang terletak di persimpangan dua benua dan dua samudra besar yang mengalami krisis identitas. Krisis itu semakin kentara di masa reformasi yang digencarkan sejak 1998, ketika nilai-nilai lama telah diruntuhkan namun nilai-nilai baru belum kunjung ditumbuhkan. Proses pencarian jati diri itu bertambah rumit karena gelombang informasi global yang mengalir ke seluruh pelosok negeri. Masalah fundamental adalah apa arti

menjadi sebuah bangsa dan mau dibawa kemana bangsa setelah enam dasa warsa merdeka. Jawaban pertanyaan itu mengingatkan kita pada tesis utama berdirinya bangsa yakni adalah kehendak untuk bersatu. Masih adakah ikatan perasaan yang sama sebagai bangsa berpenduduk 220 juta orang yang mendiami 17 ribu pulau dan terdiri dari 250-an suku bangsa? Keragaman kultural mungkin memisahkan kita secara fisik namun secara psikologis maupun spiritual kita harus merasa dekat dan bersatu bila masih ingat ingin disebut satu bangsa. Kualitas kebangsaan (*nationality*) itu akan terus diuji di masa datang seiring dengan perkembangan zaman.

Kita juga diingatkan bahwa pada hakikatnya suatu bangsa ada karena "cita-cita" bersama, dalam bahasa Benedict Anderson yang dikutip Anis Matta (2007), bangsa adalah "masyarakat yang dibayangkan bersatu dan memiliki tujuan hidup sama" (*imagined communities*). Walaupun sebenarnya setiap orang dan setiap kelompok masyarakat menghadapi persoalan yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan dan zaman yang dihadapinya, namun perasaan bersatu itu muncul karena senasib dan sepenanggungan. Itulah perasaan yang mengkristal pada masa awal kemerdekaan. Karena mayoritas bangsa ini menyadari betapa pahitnya era penjajahan yang berlangsung ratusan tahun. Itulah perasaan yang mengumpal sejak "soempah pemoeda" di tahun 1928 ketika penjajah menjalankan strategi pecah belah. Dengan mempertentangkan perbedaan fisi-kultural. Tetapi, kita berhasil mengatasi skenario penjajahan itu dengan menyatakan diri "bertanah air satu berbangsa satu, dan berbahasa satu", yaitu Indonesia.

Ironisnya, gumpalan senasib semakin mencair, kristalisasi nilai kebangsaan mengalami keretakan disana-sini, salah satunya akibat kekeliruan dalam mengelola kekuasaan di orde lama dan orde baru. Indonesia kini mengalami krisis identitas dan modalitas sebagai bangsa, serta krisis kebijakan dan keteladanan di segenap lapisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah identitas pada masa orde lama, kekuasaan dijalankan dengan sistem otoriterian berbungkus "demokrasi terpimpin". Pemerintahan pusat mendapat tantangan hebat dengan munculnya pemberontakan daerah. Lebih tragis lagi kebijakan pemerintah saat itu bersifat simbolik dan tidak menyelesaikan konflik sampai ke akarnya, sehingga muncul stigma terhadap kekuatan yang sebenarnya ingin melakukan kontrol obyektif terhadap pemerintahan yang sudah melencenga dari aspirasi rakyat. Rezim orde baru pada awalnya mencoba menangani konflik dan menciptakan stabilitas, tetapi ideologi pembangunan (*developmentalism*) yang dipaksa telah mematikan inisiatif masyarakat kritis dan aspirasi lokal. Semua potensi lokal diserap ke pusat. Sementara masyarakat daerah hanya memperoleh sedikit dari berkah atas hak kekayaan alamnya, dan kekuatan oposisi yang menuntut keadilan minimal pun ditumpas habis.

Penyimpangan kekuasaan itu telah berdampak buruk bagi pembentukan identitas nasional yang belum tuntas sepenuhnya. Sejumlah masyarakat lokal yang kebetulan berasal dari daerah kaya sumber daya alamnya merasa tersisihkan dan diperlakukan seperti anak tiri dari keluarga besar bangsa Indonesia. Hal itu terlihat dalam konteks Aceh dan Papua, juga penduduk Riau

dan Kalimantan. Pengalaman di Aceh sangat relevan untuk diambil sebagai pelajaran, meski sudah diberi otonomi khusus dengan label konstitusional sebagai Nangroe Aceh Darussalam dan diselenggarakan perdamaian dengankelompok perlawanan (GAM) yang akhirnya berpartisipasi dalam Pemilu lokal, namun luka akibat perlakuan diskriminatif belum sembuh benar. Tak dinyana, kasus Aceh mengilhami daerah lain menuntut kekhususan serupa dengan alasan berbeda, seperti di Papua, sehingga penerapan otonomi daerah bak membuka kotak pandura yang akan mengancam keutuhan NKRI. Penumbuhan semangat kebangsaan (*nation buliding*) ini berkompetisi dengan munculnya kebangkitan etnik yang berpangkal dari salah urus kebijakan ekonomi politik pusat.

Identitas nasional suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari faktor obyektif yaitu berkaitan dengan kondisi geografis-ekologis dan demografis serta faktor subyektif yaitu berkaitan dengan kondisi historis, politik, sosial dan kebudayaan yang dimiliki bangsa tersebut. Lebih rinci lagi Robert de Ventos, sebagai mana dikutip Anis Matta (2007) mengemukakan pandangan tentang munculnya identitas nasional sebagai interaksi historis antara faktor primer (mencakup *etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan sejenisnya*), faktor pendorong (pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan sentralisasi monarkis), faktor penarik (modifikasi bahasa resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional), serta faktor *rektif* (penindasan, dominasi dan pencarian identitas melalui memori kolektif rakyat).

Semua faktor itu perlu dievaluasi kembali, apakah mengalami penguatan atau pelemahan dalam kehidupan kebangsaan dan bagaimana mempercepat atau memperkuat proses yang konstruktif di masa depan. Hal itu mutlak dilakukan, bila ingin menjadi bangsa yang berusia lebih panjang dan mampu memberi kontribusi positif bagi peradaban manusia. Bila kita lalai mengelolanya, maka ajal bangsa ini sudah dekat di depan mata, dan nama Indonesia mungkin sebentar lagi akan tehaus dari peta dunia, digantikan negeri-negeri kecil yang memproklamasikan kemerdekaan dan kebebasannya sendiri. Semoga mimpi buruk itu tidak terjadi.

Modal spiritual bangsa yang religius selalu menjadi rujukan untuk menggambarkan kondisi umum masyarakat Indonesia, namun harus diakui religiusitas itu masih bersifat formalistik. Menurut Clivvord Deertz yang dicuplik Annis Matta (2007), sejak zaman lampau sudah dikenal pembagian kelompok masyarakat yang berwatak santri, abangan dan priyayi. Meskipun terdapat kritik terhadap pembagian itu, karena menggabungkan kriteria ketaatan kepada agama (*santri versus* abangan) dengan kriteria golongan sosial ekonomi (abangan). Secara umum, ada proses peningkatan kualitas hidup beragama atau disebut "santrilisas" itu tergambar dari maraknya aktivitas keagamaan, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masih terasa kurang. Kemudian mengkontraskan angka kriminalitas dan penyimpangan kekuasaan masih tinggi, bila religiusitas masyarakat terus meningkat. Hingga timbul keraguan disebagian pihak sejauh mana agama dapat mengontrol perilaku pemeluknya agar sejalan dengan nilai-nilai luhur.

Di kalangan muslim, bangkitnya religiusitas diperkuat oleh rancaknya aktivitas dakwah dengan berbagai metoda. Ada yang memompa militansi akidah, mempopulerkan dzikir dan muhasabah kolektif, membangkitkan etos kerja berbasis religius, atau menyebarkan pesan erdamaian dan toleransi. Setiap format dakwah itu memiliki juru bicara tersendiri dan membentuk komunitas yang setia. Sayangnya, mereka belum dipertemukan dalam suatu program keumatan yang mempersatukan semua kelompok dengan arahan kepemimpinan kolektif. Kegersangan spiritual yang dirasakan sebagian orang di kota maupun di daerah tertentu juga telah menggiring mereka untk mencari modus spiritual yang berbeda dengan agama formal. Hal ini merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi kelompok arus utama yang ingin memantapkan peran agama ditengah perubahan sosial.

Perilaku massa karena kegagalan elit untuk menampilkan teladan dalam berbagai bidang membuat masyarakat menempuh jalannya sendiri-sendiri. Mereka jadi bersikap *individualistik*, *hedonistik* dan *permisif* dalam menyikapi berbagai persoalan disekitarnya. Gejala itu diperkuat oleh penyebaran informasi dan pembentukan sikap melalui berbagai media. Masyarakat bertahan hidup untuk memenuhikebutuhan utamanya. Bila mereka mendapat kelebihan fasilitas maka diperuntukan bagi diri dan keluarga terdekatnya. Perasaan untuk berbagi semakin luntur, terutama di wilayah perkotaan.

Sementara itu warga masyarakat yang kurang beruntung menjadi bersikap mudah marah dan cepat tersinggung. Mereka memilki emosi yang bersumbu pendek, jika menghadapi tekanan atau perbedaan dengan lingkungan

sehingga konflik sosial mudah tersulut seperti terjadi di Maluku, Poso, Sampit dan Sambas. Akhirnya konflik berkembang menjadi isu komunalisme, penduduk asli versus kaum pendatang, dan pembentukan identitas nasional berada di tepi jurang disintegrasi.

Paling menyedihkan, gejala kekerasan juga merasuki dunia rumah tangga dengan korban terutama kalangan perempuan dan anak-anak lemah. Hal itu mencerminkan mulai rapuhnya kehidupan keluarga sebagai soko guru masyarakat. Terpaan budaya asing dan arus urbanisasi atau modernisasi yang destruktif juga turut andil.

Partai Keadilan Sejahtera menyadari melalui mekanisme *otokritik* kolektif yang serius, bahwa memahami persoalan atau mendeteksi penyakit lebih diutamakan ketimbang mencari solusi dan mencoba terapi yang bersifat spontan atau *sporadik*. Solusi tuntas hanya mungkin berdasarkan atas akar masalah yang *komprehensif*.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuat dokumentasi ilmiah tentang beberapa hal berikut ini, yang meliputi :

- (1) Memberi *deskripsi* secara sosiologis terhadap latar belakang kelahiran Partai Keadilan Sejahtera.
- (2) Menjelaskan visi, misi dan orientasi Partai Keadilan Sejahtera dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembinaan kader.

- (3) Mencermati platform kebijakan Partai Keadilan Sejahtera bidang sosial budaya, fokusnya pada bidang pendidikan.
- (4) Menggali usaha-usaha sosial dan konseptual Partai Keadilan Sejahtera dalam bidang pendidikan dan pembinaan kader secara obyektif.
- (5) Mengarahkan peran sosial pendidikan Partai Keadilan Sejahtera dalam kontribusinya terhadap masa depan dan kemajuan bangsa

C. Tinjauan Pustaka

Mahmud (1999) menyebutkan bahwa pendidikan atau sering disebut *tarbiyah* merupakan proses penyiapan manusia manusia yang shalih, agar tercipta suatu keseimbangan dalam potensi, tujuan, ucapan dan tindakan secara keseluruhan. Sehingga pengertian tentang pendidikan yaitu cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata) maupun secara tidak langsung (berupa keteladanan, sesuai dengan sistem dan perangkatnya yang khas), untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik

Selanjutnya definisi di atas dijelaskan dengan lebih rinci :

- *Cara*, adalah metode berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain
- *Ideal*, yaitu sesuatu yang paling baik, paling utama dan paling efektif
- *Interaksi*, berinteraksi dengan manusia harus berdasarkan fitrah, yang perumusannya kembali kepada bimbingan Sang Pencipta, yaitu dzat yang Maha Mengetahui.

- *Fitrah*, yaitu tabiat manusia dengan ssgenap unsur yang melekat padanya, keutamaan dan kekurangan individu.
- *Langsung*, yaitu berupa pengajaran, pembinaan, dan pengarahan pribadi secara langsung.
- *Tidak langsung*, berupa contoh dan keteladanan dengan amal shalih, perilaku lurus dan akhlak mulia
- *Sistem/manhaj*, yaitu jalan yang harus dijadikan sebagai sandaran hukum bagi manusia, ia ibarat jalan yang harus jelas rambu-rambnua dan detil pula jalurnya.

Said Hawwa (1999) menambahkan, pendidikan harus disampaikan secara integral dan komprehensif, sehingga mapu memecahkan persoalan-persoalan hidup manusia. Sistem yang komprehensif mengandung dua pilar pokok, yaitu

- Pilar *tarbawi* (Pembinaan) yang terdiri dari pola belajar mengajar dengan ragam perangkatnya yang bertujuan untuk menyempurnakan potensi pribadi muslim yang terpelajar dan mengubahnya ke kondisi yang lebih baik sehingga mampu berinteraksi dengan hidup dan kehidupan, dengan harapan mampu untuk mewujudkan kemaslahatan.
- Pilar *tanzhimi* (institusional) yang terdiri dari dua jenis, yaitu institusi internal masyarakat dan institusi eksternal. Institusi internal masyarakat bertugas meletakkan dasar kode etik dan batasan-batasan yang harus dijalin sesama muslim. Sedangkan Institusi Eksternal bertugas menetapkan batasan hubungan negara Islam dan lainnya.

Lebih tegas, Fathi Yakan (2007) menyatakan, cakupan pendidikan adalah meliputi hal-hal berikut:

- Individu (pribadi Muslim)
- Rumah tangga Muslim
- Masyarakat
- Negara

Rumusan lain menyatakan, dimulai dengan memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, kumatan, bangsa dan negara, masyarakat kemanusiaan dari khilafah sampai *ustadziyatul 'alam* yaitu menjadi guru peradaban, guru dunia (Hilmi Aminuddin, 2008)

D. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana sesungguhnya konsep pendidikan Partai Keadilan Sejahtera dalam merespon problem kependidikan masyarakat muslim dewasa ini yang dikemas dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- (1) Bagaimana konsep pendidikan Partai Keadilan Sejahtera?
- (2) Sejauh mana konsep pendidikan tersebut dapat teraplikasi dan dapat merespon kebutuhan masyarakat?

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menggali kosep pendidikan Partai Keadilan Sejahtera seperti yang diurai dalam platform kebijakan pembangunan Partai Keadilan Sejahtera yang disusun oleh Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (2007).